



PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

**BerAKHLAK** **#bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKIP)  
TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atas pencapaian kinerja Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja. LKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kepada Kepala Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Menjabarkan secara singkat, padat dan jelas akan target, realisasi maupun capaian dari sasaran strategis yang memuat indikator kinerja dinas. Berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memuat tentang apa yang menjadi sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta indikator kerjanya. Memuat tentang target yang harus dicapai yang dikorelasikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran strategis maupun indikator kinerja. data realisasi yang dicapai Ketika disandingkan dengan target rencana dapat memberikan pemahaman mendasarkan akan tingkat capaian dinas apakah berhasil atau gagal. Serta permasalahan yang dihadapi, solusi yang diberikan, tindak lanjut yang akan diambil, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kedepannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Hasil pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan semua sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja dengan target yang ditetapkan terealisasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah bekerja dengan baik dalam mewujudkan target yang ditetapkan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bengkayang, Februari 2026

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang



**MARTINUS PONES,ST**

Pembina Utama Muda

NIP.19661112 200003 1 004



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
<b>BAB I</b> <b>PENDAHLUAN</b> .....	3
1.1    Latar Belakang.....	3
1.2    Gambaran Umum.....	3
1.2.1    Kedudukan dan Susunan Organisasi.....	3
1.2.2    Tugas Pokok dan fungsi.....	4
1.2.3    Struktur organisasi.....	4
1.3    Identifikasi Permasalahan & Isu Strategis.....	9
1.3.1    Landasan hukum penyusunan .....	11
1.3.2    Sistematika penyajian .....	13
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	14
2.1    Perencanaan Strategi .....	14
2.2    Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	14
2.3    Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	15
2.4    Penetapan Kinerja.....	17
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	21
3.1    Pengukuran Kinerja.....	21
3.2    Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.2.1    Sasaran Strategis 1 .....	25
3.2.2    Sasaran Strategis 2 .....	28
3.2.3    Sasaran Strategis 3 .....	38
3.2.4    Sasaran Strategis 4 .....	40
3.2.5    Sasaran Strategis 5 .....	42
3.2.6    Sasaran Strategis 6 .....	44
3.3    Realisasi Anggaran.....	48
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	51
4.1    Kesimpulan .....	51
4.2    Saran.....	52



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Sebagaimana di amanatkan sesuai Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### 1.2 Gambaran Umum SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 atas Perubahan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 dimaksud dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.



### 1.2.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal (3) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten

### 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- d. Pengelolaan urusan manajemen Aparatur Sipil Negara;
- e. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten;
- f. Pembinaan dan pengkoordinasian urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten;
- g. Pembinaan dan pengkoordinasian perangkat daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten;
- h. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dan pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Sumber Daya Air;
- j. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Bina Marga;
- k. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya;
- l. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- m. Pengendalian dan evaluasi program pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.2.3 Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan



### Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi;
  - a. Sub bagian administrasi, umum dan kepegawaian;
  - b. Sub bagian rencana kerja dan keuangan.
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Sumber Daya Air;
5. Bidang Tata Ruang;
6. Bidang Cipta Karya;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang pada tahun 2025 sebanyak 84 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan formal, serta pangkat dan golongan serta diklat penjenjangan (struktural), sebagai berikut :

#### **Latar Belakang Pendidikan formal PNS**

No	Latar belakang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	4
2	Strata 1	35
3	Diploma 3	8
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
Total		57

#### **Latar Belakang Pendidikan formal PPPK**

No	Latar belakang Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	0
2	Strata 1	7
3	Diploma 3	4
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	14
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
6	Sekolah Dasar (SD)	1
Total		27

Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang bahwa jumlah pegawai dengan kualifikasi Sarjana sebanyak 58 orang atau 69% dari jumlah pegawai.



### Golongan Kepangkatan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	45
3	Golongan II	9
Total		84

### Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

No	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah (orang)
1	Diklatpim Tk.II	-
2	Diklatpim Tk.III	2
3	Diklatpim Tk.IV	-
Total		1

### Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)
1	Eselon II B	1
2	Eselon IIIA	1
3	Eselon IIIB	4
4	Eselon IVA	2
5	Eselon IVB	-
Total		8

Kondisi Peralatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang secara garis besar dapat dilihat pada tabel :

No	Item inventaris	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)	
			Baik	Rusak
1	Gedung Kantor	2	2	-
2	Laboratorium / workshop	1	1	-
3	Peralatan kerja	519	473	46
Total		522	500	46

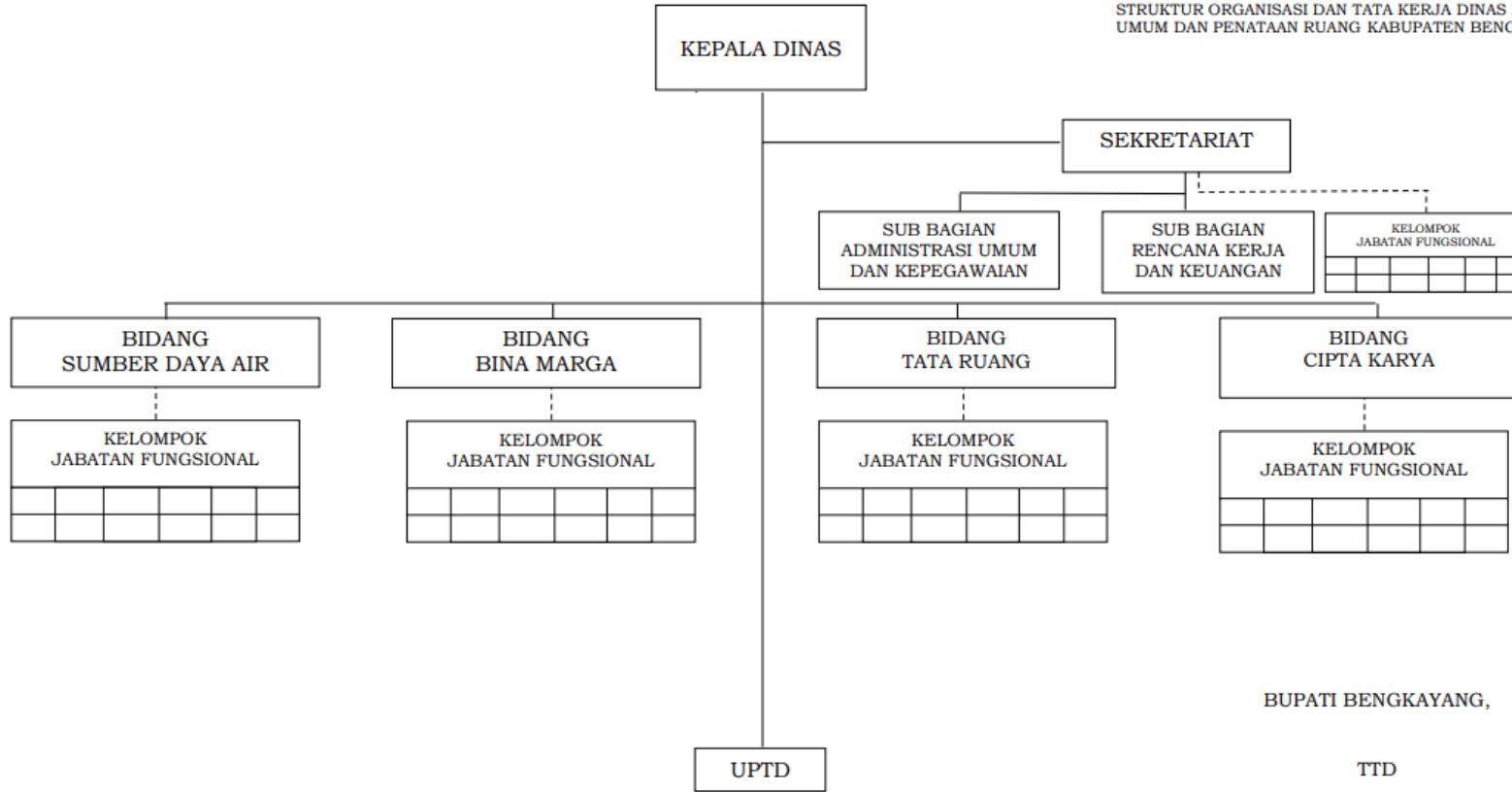
### Kondisi Inventaris Kendaraan Dinas/Operasional Dan Alat Alat Berat

No	Item Inventaris	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	RODA DUA	44	37	7
2	RODA EMPAT	5	4	1
3	RODA ENAM	3	2	1
4	TRONTON	1	0	1
5	EXCAVATOR	2	1	1
6	BULLDOZER	1	1	0
7	GREDER	1	1	0
8	THREE WHEEL ROLLER	1	1	0
9	VIBRO ROLLER	1	0	1
10	BECKHO LOADER	1	0	1
JUMLAH		60	47	13

## Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 91 TAHUN 2021  
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS



**Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang-Bidang  
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah**

No	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
A.	<b>Kepala Dinas</b>	melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.	memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
B.	<b>Sekretaris</b>	memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;</li> <li>pelaksanaan pengelolaan keuangan;</li> <li>pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara dan urusan manajemen Aparatur Sipil Negara;</li> <li>pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ol>
C.	<b>Bidang Sumber Daya Air</b>	membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan pedoman, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional dan pemeliharaan kegiatan di bidang Sumber Daya Air.	<ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;</li> <li>perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air;</li> <li>mendistribusikan tugas dan memberi bidang Sumber Daya Air;</li> <li>petunjuk pelaksanaan kegiatan di melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Sumber Daya Air;</li> <li>menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Sumber Daya Air;</li> <li>memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Sumber Daya Air;</li> <li>melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Sumber Daya Air; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ol>
D.	<b>Bidang Tata Ruang</b>	menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan pembinaan tata ruang, pelaksanaan penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang tata ruang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana dan program kerja sesuai rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Ruang;</li> <li>Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang;</li> <li>mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang Tata Ruang;</li> <li>melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Tata Ruang;</li> <li>menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang Tata Ruang;</li> <li>memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Tata Ruang;</li> <li>melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Tata Ruang; dan</li> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ol>
E.	<b>Bidang Cipta Karya</b>	Menyiapkan bahan dan merumuskan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana dan program kerja sesuai</li> </ol>

kebijakan teknis dibidang air minum dan penyehatan lingkungan, pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang cipta karya.

- rencana strategis sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Cipta Karya;
- perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;
  - mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya;
  - melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang Cipta Karya;
  - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang Cipta Karya;
  - memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi di bidang Cipta Karya;
  - melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pejabat pengawas, pejabat pelaksana atau pejabat fungsional di bidang Cipta Karya; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 1.3 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Adapun Permasalahan utama (strategic issue) yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan di bidang Bina Marga Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Bina Marga, sebagai berikut :

- Kondisi jalan tidak mantap (jalan kondisi rusak ringan dan rusak berat) kabupaten Bengkayang sebesar 31,65% (260,50 Km);
- Jembatan Kabupaten dengan kondisi tidak mantap (rusak sedang, rusak berat, jembatan kritis dan jembatan runtuh) sebesar 36,00% (310 jembatan);
- Beberapa jalan poros kecamatan (Suti Semarang dan Lembah Bawang), penghubung akses ibu kota;
- Beberapa jembatan pada jalan poros kecamatan ( Suti Semarang dan Lembah Bawang), penghubung akses ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten belum dalam kondisi baik/mantab;
- kurangnya kualitas ruas jalan Kabupaten untuk penunjang kegiatan ekonomi, pariwisata, pertanian dan perkebunan;
- Beberapa jembatan masih belum memenuhi standar jembatan layak dan aman (SNI);
- Kurang tersedianya Data teknis data Base Jalan dan Jembatan Kabupaten.

b. Permasalahan di bidang Cipta Karya

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Cipta Karya, sebagai berikut :

- Belum terlindunginya Sumber air baku yang menjadi sumber SPAM;
- Kurang optimalnya kinerja penyelenggaraan SPAM;
- Belum tersedianya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kabupaten;
- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya ketersediaan Air Minum yang layak;
- Masih terdapat 40,66% masyarakat kabupaten belum berakses air minum yang layak dan terlindungi;
- Akses Sanitasi layak masyarakat masih 46% Masih terdapat 55,87 % Rumah Tangga yang belum mendapatkan Akses Sanitasi Layak/aman;
- Belum tersedianya TPST Kabupaten;
- Belum tersedianya Saprass Penunjang Persampahan;



9. Masih kurangnya proporsi PSU dengan luas kawasan permukiman perkotaan;
  10. Masih banyaknya Bangunan Gedung dan Rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
  11. Masih banyak Bangunan Gedung Pemerintah yang tidak layak fungsi.
- c. Permasalahan di bidang Sumber Daya Air
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Sumber Daya Air, sebagai berikut :
1. Sebagian jaringan irigasi tidak berfungsi;
  2. Belum lengkapnya sistem jaringan irigasi;
  3. Alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi;
  4. Terbatasnya pengembangan lahan rawa sebagai lahan irigasi baru;
  5. Penggunaan air irigasi cenderung boros dikarenakan masih rendahnya efisiensi masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
  6. Menurunnya debit pada sumber-sumber air;
  7. Tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air;
  8. Rendahnya kualitas air dikarenakan tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya;
  9. Tingginya kebutuhan air baku akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, berkembangnya aktivitas manusia dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air;
  10. Rendahnya ketersediaan prasarana air baku;
  11. Kerusakan daerah tangkapan air dan alih fungsi lahan yang cukup massive;
  12. Perubahan Iklim;
  13. Peningkatan erosi pada daerah hulu;
  14. buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai.
- d. Permasalahan di bidang Tata Ruang
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tata Ruang, sebagai berikut :
1. Batas administrasi dan luas wilayah Kabupaten Bengkayang masih berdasarkan klaim sepihak, belum berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Berita Acara Kesepakatan Dengan Kabupaten Kota Berbatasan;
  2. Belum adanya penegasan batas desa sehingga unit analisa luasan keruangan ditingkat desa kecamatan sulit dilakukan;
  3. Belum menyesuaikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat;
  4. Sektor pertanian belum memuat ketentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  5. Dominasi pemanfaatan ruang untuk sektor perizinan perkebunan;
  6. Kawasan Strategis Kabupaten, serta Kawasan Industri sebagai pusat pertumbuhan wilayah belum ditetapkan secara defenitif, dan belum menangkap peluang multiplier effect dari pembangunan PLBN Jagoi Babang dan Pelabuhan Internasional Kijing;
  7. Sistem pusat-pusat permukiman belum terhirarki dengan baik, yang dapat mengakomodir pengembangan;
  8. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang khususnya pada Kawasan strategis dan cepat tumbuh sebagai rencana rinci yang mengatur peraturan zonasi dan instrument untuk perizinan tata ruang;



### Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang kurang memadai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infrastruktur jalan yang kurang baik dan memadai;</li> <li>2. Keterbatasan infrastruktur terutama kualitas jembatan yang memenuhi standar jembatan aman dan layak;</li> <li>3. Pengembangan Jalan Baru dalam mengantisipasi tingginya volume kendaraan dan pertumbuhan penduduk.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi jalan tidak mantap (jalan kondisi rusak ringan dan rusak berat) Kabupaten Bengkayang sebesar 31,65% (260,50 Km);</li> <li>2. Jembatan Kabupaten dengan kondisi tidak mantap (rusak sedang, rusak berat, jembatan kritis dan jembatan runtuh) sebesar 36,00% (310 jembatan);</li> <li>3. Beberapa jalan poros kecamatan (Suti Semarang dan Lembah Bawang), penghubung akses ibu kota;</li> <li>4. Beberapa jembatan pada jalan poros kecamatan ( Suti Semarang dan Lembah Bawang), penghubung akses ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten belum dalam kondisi baik/mantab;</li> <li>5. kurangnya kualitas ruas jalan Kabupaten untuk penunjang kegiatan ekonomi, pariwisata, pertanian dan perkebunan;</li> <li>6. Beberapa jembatan masih belum memenuhi standar jembatan layak dan aman (SNI);</li> <li>7. Kurang tersedianya Data teknis data Base Jalan dan Jembatan Kabupaten.</li> </ol>
2	Belum Optimal penyelenggaraan SPAM di Kabupaten dalam penyediaan air bersih.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi kinerja penyelenggaraan SPAM;</li> <li>2. Membentuk kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kabupaten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terlindunginya Sumber air baku yang menjadi sumber SPAM;</li> <li>2. Kurang optimalnya kinerja penyelenggaraan SPAM;</li> <li>3. Belum tersedianya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kabupaten;</li> <li>4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya ketersediaan Air Minum yang layak;</li> <li>5. Masih terdapat 40,66% masyarakat kabupaten belum berakses air minum yang layak dan terlindungi.</li> </ol>
3	Belum Optimal penyediaan Jaringan Sanitasi Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penyediaan Jaringan Sanitasi Masyarakat;</li> <li>2. Pembentukan kebijakan strategi pengembangan dan penyediaan jaringan sanitasi kabupaten;</li> <li>3. Optimalisasi Penataan Bangunan Lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses Sanitasi layak masyarakat masih 46% Masih terdapat 55,87 % Rumah Tangga yang belum mendapatkan Akses Sanitasi Layak/aman;</li> <li>2. Belum tersedianya TPST Kabupaten;</li> <li>3. Belum tersedianya Saprass Penunjang Persampahan;</li> <li>4. Masih kurangnya proporsi PSU dengan luas kawasan permukiman perkotaan;</li> <li>5. Masih banyaknya Bangunan Gedung dan Rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>6. Masih banyak Bangunan Gedung Pemerintah yang tidak layak fungsi.</li> </ol>
4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang yang belum Optimal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dinamika dan perubahan pada Perda Nomor 7 Tahun 2014;</li> <li>2. Proporsi pemanfaatan ruang untuk perkebunan yang terlalu besar;</li> <li>3. Luasan RTH Kabupaten yang belum memenuhi angka 35%;</li> <li>4. Optimalisasi penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas administrasi dan luas wilayah Kabupaten Bengkayang masih berdasarkan klaim sepihak, belum berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Berita Acara Kesepakatan Dengan Kabupaten Kota Berbatasan;</li> <li>2. Belum adanya penegasaan batas desa sehingga unit analisa luasan keruangan ditingkat desa kecamatan sulit dilakukan;</li> <li>3. Belum menyesuaikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat;</li> <li>4. Sektor pertanian belum memuat ketentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li> <li>5. Dominasi pemanfaatan ruang untuk sektor perizinan perkebunan;</li> <li>6. Kawasan Strategis Kabupaten, serta Kawasan Industri sebagai pusat pertumbuhan wilayah belum ditetapkan secara defenitif, dan belum menangkap peluang multiplier effect dari pembangunan PLBN Jagoi Babang dan Pelabuhan Internasional Kijing;</li> <li>7. Sistem pusat-pusat permukiman belum terhirarki dengan baik, yang dapat mengakomodir pengembangan;</li> <li>8. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang khususnya pada Kawasan strategis dan cepat tumbuh sebagai rencana rinci yang mengatur peraturan zonasi dan instrument untuk perizinan tata ruang;</li> <li>9. Ketentuan umum dan peraturan zonasi belum memuat ketentuan yang lebih rinci sebagai instrumen untuk pengendalian pemanfaatan ruang.</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
5	Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi	1. Optimalisasi Jaringan Irigasi 2. Banjir dan Kekeringan	1. Sebagian jaringan irigasi tidak berfungsi; 2. Belum lengkapnya sistem jaringan irigasi; 3. Alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi; 4. terbatasnya pengembangan lahan rawa sebagai lahan irigasi baru.
6	Rendahnya ketersediaan Air Baku	Optimalisasi Layanan Air Baku	1. Penggunaan air irigasi cenderung boros dikarenakan masih rendahnya efisiensi masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; 2. Menurunnya debit pada sumber-sumber air; 3. tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air; 4. Rendahnya kualitas air dikarenakan tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya; 5. Tingginya kebutuhan air baku akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, berkembangnya aktivitas manusia dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air; 6. Rendahnya ketersediaan prasarana air baku; 7. Kerusakan daerah tangkapan air dan alih fungsi lahan yang cukup massive; 8. Perubahan Iklim; 9. Peningkatan erosi pada daerah hulu 10. buruknya sistem drainase mikro dan pembuangan sampah di badan sungai.

### 1.3.1 Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten DaerahTingkat II Bengkayang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah;



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### 1.3.2 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025. Capaian Kinerja (performance result) pada Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolok ukur keberhasilan Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bengkayang.
- b. Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas dan renja tahun 2025 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.
- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja
  1. Capaian IKU  
Pada sub bab ini diuraikan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMD.
  2. Realisasi Kinerja  
Pada subbab ini disajikan capaian kinerja yang meliputi (1) Perumusan Kebijakan strategis dan teknis yang telah diterbitkan yang digunakan sebagai panduan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, dan
  3. Capaian sasaran utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Realisasi Anggaran  
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.
4. Bab IV Penutup



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari Eselon III Mandiri, dan Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang telah mengambil kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Dinas.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan *Stakeholder*.

Dengan di tetapkannya RPJMD Periode Tahun 2025-2029 mempengaruhi Capaian Kinerja yang ditetapkan pada laporan semester pertama sehingga pada laporan Akhir terdapat dua indikator capaian kinerja yang disajikan.

### 2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG

Keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 serta perubahan penyesuaian terhadap Visi Misi Kepala Daerah sebagai implementasi tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, **VISI** merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun penjelasan visi pembangunan jangka menengah Kota Tangerang tersebut ada sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU,  
MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”**

### Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Periode Tahun 2025-2029

VISI :		<i>Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.</i>	
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1.	<i>Melanjutkan pembangunan infrastruktur.</i>	Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang dan Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman	1 Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten; 2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman; 3 Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik; 4 Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang; 5 Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten; 6 Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

### Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Periode Tahun 2021-2026

VISI :		<i>Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka</i>	
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar pemukiman	1. Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang; 2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya; 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air limbah).
2.	Mewujudkan Pembangunan Daerah berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Menggunakan ruang berdasarkan RTRW dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW.

## 2.3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi merupakan cara mencapai tujuandengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman / pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. Perumusan Tujuan, Strategis, dan Arah Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah



sebagai berikut:

**Visi :**

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”**

**Misi III :**

**Melanjutkan pembangunan infrastruktur.**

mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka untuk mengimplementasikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada masa transisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas yang didukung dengan Pengelolaan Tata Ruang	Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber Air Baku Kabupaten	Peningkatan Kualitas Layanan Air Baku; Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah aliran sungai (DAS) atau drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim;	
		Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	Percepatan Pembangunan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi Primer dan Sekunder secara Partisipatif; Penambahan air irigasi sesuai potensi pemanfaatan sumber daya alam daerah;	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM	Peningkatan Kualitas Layanan dan Distribusi Air Minum Kepada Masyarakat; Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan; Perluasan jaringan PDAM ke seluruh pelosok antara lain melalui pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPAM) baru; Pengembangan dan pembangunan teknologi tepat guna untuk pengolahan air bersih yang layak minum;
	Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung demi kelayakan bangunan	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui Pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/ peningkatan IPAL sistem setempat;
			Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai	Percepatan pembangunan dan pengelolaan drainase perkotaan yang maksimal;
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang beroperasi	Pengembangan dan pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bengkayang; Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
	Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung demi kelayakan bangunan	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, trotoar, drainase Pendukung Jalan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan	Optimalisasi Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung Pemerintah untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan Gedung dengan lingkungannya;
			Melakukan pendataan terhadap tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan, Jembatan, drainase tepi jalan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan;
	Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Melakukan pendataan terhadap tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat	Melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan kepada Tenaga ahli Konstruksi Kualifikasi;	
	Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan	Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang serta meningkatkan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang;	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		ruang	Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik;
	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur	Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan penyediaan sarana dan prasarana dalam urusan kepegawaian;
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Memaksimalkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## 2.4 PENETAPAN KINERJA

Dalam Permen PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan LAKIP BAB III pasal 3 bahwa Penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki.

Penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan antara kepala Dinas dengan Bupati Bengkayang. Penetapan ini dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil.

Dokumen Penetapan kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis, Indikator Kinerja, Target/ Rencana Capaian, Program/ kegiatan dan Anggaran. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja sasaran harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Format Penetapan Kinerja Tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini:

### Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tata Cara Perhitungan/ Rumusan Indikator Utama
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	1. Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)	Kapasitas Air Baku Kabupaten
		2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik}}{\text{Luas Lahan budidaya Pertanian}}$
2.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap Sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100$
		4. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100$
		5. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100$
		6. Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi
3.	Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	7. Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis (%)	$\frac{\text{jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah bangunan}} \times 100$
4.	Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	8. Ketaatan Terhadap RTRW (%)	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$
5.	Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	9. Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$
6.	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	10. Predikat Nilai Sakip (Kategori)	Nilai SAKIP

### Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tata Cara Perhitungan/ Rumusan Indikator Utama
1	2	3	4
1.	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	$\frac{\text{Jumlah Jalan dalam Kondisi Baik & sedang}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tata Cara Perhitungan/ Rumusan Indikator Utama
1	2	3	4
1	yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	2. Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Dilatih	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analisis x 100 Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analisis di wilayah Kabupaten
2.	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	3. Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik}}{\text{Luas Lahan budidaya Pertanian}} \times 100$
		4. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi di Kabupaten Bengkayang}} \times 100$
		5. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100$
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	6. Rumah tangga berakses air minum	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten Bengkayang}} \times 100$
		7. Rumah tangga bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal di Kabupaten Bengkayang}} \times 100$
4.	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	8. Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Listrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Bengkayang}} \times 100$
5.	Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW	9. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	$\frac{\text{Luas Wilayah sesuai peruntukan RTRW}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Bengkayang}} \times 100$
		10. Rasio bangunan ber-IMB per Satuan bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber-IMB}}{\text{Jumlah bangunan}} \times 100$
		11. Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah bangunan}} \times 100$
6.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Aset Pemerintah	12. Persentase Penatausahaan, Anggaran, Keuangan dan Aset OPD	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100$

**Perjanjian Kinerja  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	61,1
		Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Dilatih	60%
2	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	80
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	47,07%
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Rumah tangga berakses air minum (%)	0,00252
		Rumah tangga bersanitasi (%)	64,01%
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	51,3
4	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Rumah Tangga pengguna listrik PLN	56,40%
5	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang (RTRW)	58
		Rasio bangunan ber-IMB per Satuan bangunan	11,5
		Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	73,82
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Aset Pemerintah	Persentase Penatausahaan, Anggaran, Keuangan dan Aset OPD	100%

**Perubahan Perjanjian Kinerja  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)	1729,5
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)	0,21
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	59,4
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)	44,13



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	82,79
		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)	2
3	Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis (%)	86,66
4	Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	90
5	Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	31,65
6	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat Nilai Sakip (Kategori)	B
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	87,23

Adapun Program-program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis di atas adalah seperti table dibawah ini:

**Program Pendukung Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	336.880.050
2.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.625.667.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.420.497.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00
3.	Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.996.527.080,00
4.	Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	249.460.000,00
5.	Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	17.178.760.266,90
6.	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.244.779.872,10

Sesuai APBD dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah mengajukan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 44.955.575.305,00 yang digunakan untuk membiayai program/kegiatan sebagaimana tersebut diatas.

**Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah**

No	Indikator Kinerja Utama	Program Pendukung	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4
1	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
2	Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota..
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.



No	Indikator Kinerja Utama	Program Pendukung	Kegiatan Pendukung
7	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.
8	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis (%)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
9	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;</li><li>2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;</li><li>3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.</li></ol>
10	Predikat Nilai Sakip (Kategori)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;</li><li>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;</li><li>3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;</li><li>4 Administrasi Umum Perangkat Daerah;</li><li>5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</li><li>6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</li></ol>
11	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang secara umum telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, mengingat dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai implementasi maka terdapat beberapa belanja infrastruktur di tunda bahkan dibatalkan sebesar Rp. 78.367.745.500 sehingga sangat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, namun dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, seluruh target yang telah direncanakan dapat di realisasikan secara maksimal.

#### 3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator tujuan dan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran Kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

#### 3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Periode Tahun 2021-2026 dan Periode Tahun 2025-2029 dengan indikator kinerja utama dan sasaran yang dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 terhadap sasaran strategis terdapat 2 (dua) capaian yang merupakan satu kesatuan capaian organisasi adalah sebagai berikut :

**Tabel Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025  
Renstra Periode Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)	Liter/Detik	1729,5	1729,5	1729,5	1,00
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilyani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)	Angka	0,21	0,83	0,21	0,25



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	%	59,4	60,72	60,18	0,99
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)	%	44,13	44,61	44,72	1,00
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	%	82,79	83,69	82,79	0,99
		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)	Unit	2	2	2	1,00
3	Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis (%)	%	86,66	95,33	86,66	0,91
4	Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	%	84,09	90	84,09	0,93
5	Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	Angka	31,65	31,65	32,06	1,01
6	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat Nilai Sakip (Kategori)	Kategori	B	B	B	1,00
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	Angka	87,23	87,23	87,23	1

Pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang **baik**, tercermin dari sebagian besar indikator kinerja utama yang mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan relatif efektif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan.

1. Sasaran Meningkatkan Kapasitas Air Baku Kabupaten Kapasitas air baku Kabupaten pada Tahun 2025 tercapai sebesar 1.729,5 liter/detik, sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Namun demikian, indikator rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan realisasi sebesar 0,21 dari target 0,83, dengan capaian 25%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi masih perlu ditingkatkan guna mendukung optimalisasi pelayanan irigasi.
2. Sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum layak/aman mencapai 60,18% dari target 60,72%, dengan capaian kinerja 99%. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak/aman terealisasi sebesar 44,72%, melampaui target 44,61%, sehingga capaian mencapai 100%. Persentase drainase dalam kondisi baik tercatat 82,79%, mendekati target 83,69%, dengan capaian 99%, yang menunjukkan kondisi drainase secara umum masih terjaga dengan baik.
3. Selain itu, jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang beroperasi tetap sebanyak 2 unit, tidak ada penambahan pada ahun 2025;
4. Sasaran Meningkatkan Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Persentase bangunan gedung pemerintah daerah yang memenuhi standar teknis mencapai 86,66%, tidak ada peningkatan dan capaian kinerja pada tahun 2025 masih ke baselin tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan secara bertahap.
5. Sasaran Investasi Pembangunan Daerah Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencapai 84,09%, belum memenuhi target 90%, dengan capaian kinerja 93%. Meskipun demikian, capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang cukup baik dan perlu terus diperkuat melalui pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih optimal.
6. Sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan Kabupaten Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 32,06, melampaui target 31,65, dengan capaian kinerja

- 101%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten dalam mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah.
7. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur serta Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel Nilai SAKIP Tahun 2025 dengan kategori B sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. Sementara itu, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 87,23 sesuai dengan target awal dengan capaian 100%, yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sesuai dengan data awal tahun sebelumnya.

**Tabel Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025  
Renstra Periode Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	31,65	61,1	32,06	0,52
		Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih	%	95	80	0	0,00
2.	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Rasio	0,21	0,00252	0,21	83,33
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	56,48	51,30	56,48	1,10
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	82,79	58,00	82,79	1,43
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Rumah tangga berakses air minum	%	59,4	73,82	60,18	0,82
		Rumah tangga bersanitasi	%	44,13	69,01	44,72	0,65
4.	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN		58.990	59.224	58.990	1,00
5.	Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	%	100	100	90	0,90
		Rasio bangunan ber IMB per Satuan bangunan	Rasio	15	13,6	15	1,10
		Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	%	86,66	60	86,66	1,44
6.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Aset Pemerintah	Persentase Penatausahaan, Anggaran, Keuangan dan Aset OPD	%	96,64	100	95,6	0,96

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi, dengan beberapa indikator telah melampaui target, sementara indikator lainnya masih belum optimal dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

1. Tersedianya Infrastruktur, Prasarana, dan Sarana Transportasi yang Handal  
Pada sasaran ini, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang terealisasi sebesar 32,06% dari target 61,1%, dengan capaian kinerja 52%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas jaringan jalan masih perlu diakselerasi.  
Sementara itu, indikator persentase tenaga terampil konstruksi yang dilatih belum menunjukkan capaian, dengan realisasi 0% dari target 80%. Hal ini mengindikasikan belum terlaksananya program pelatihan tenaga terampil konstruksi pada Tahun 2025.
2. Tersedianya Sumber Daya Air yang Handal dan Berkualitas  
Indikator rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik menunjukkan realisasi 0,21, jauh melampaui target 0,00252, dengan capaian kinerja 83,33%, yang mencerminkan kondisi jaringan irigasi relatif terjaga.  
Selanjutnya, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik terealisasi sebesar 56,48%, melampaui target 51,30%, dengan capaian kinerja 110%.  
Adapun persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai 82,79% dari target 58%, dengan capaian kinerja 143%, menunjukkan kondisi sistem drainase yang sangat baik.

3. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman  
Persentase rumah tangga berakses air minum terealisasi sebesar 60,18% dari target 73,82%, dengan capaian kinerja 82%.  
Sementara itu, rumah tangga bersanitasi mencapai 44,72% dari target 69,01%, dengan capaian 65%. Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses air minum dan sanitasi masih memerlukan upaya berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kesadaran masyarakat.
4. Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan  
Jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN terealisasi sebanyak 58.990 rumah tangga, sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan layanan ketenagalistrikan bagi masyarakat telah terjaga dengan baik.
5. Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW  
Indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW terealisasi sebesar 90% dari target 100%, dengan capaian 90%, menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik namun masih perlu ditingkatkan.  
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan mencapai 15, melampaui target 13,6, dengan capaian 110%, yang mencerminkan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perizinan bangunan.  
Selain itu, persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik terealisasi sebesar 86,66% dari target 60%, dengan capaian 144%, menunjukkan kondisi bangunan gedung secara umum dalam keadaan baik.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan, dan Aset  
Indikator persentase penatausahaan, anggaran, keuangan, dan aset OPD terealisasi sebesar 95,6% dari target 100%, dengan capaian 96%. Capaian ini menunjukkan pengelolaan administrasi dan keuangan OPD telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada masa transisi pergantian dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), sering terjadi penyesuaian sasaran strategis meskipun berada pada tahun yang sama. Hal ini disebabkan karena RENSTRA baru dapat membawa arah kebijakan, prioritas program, dan indikator kinerja yang berbeda dari RENSTRA sebelumnya.

Perbedaan sasaran strategis di tahun yang sama pada masa transisi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perubahan fokus prioritas RENSTRA baru dapat menetapkan fokus prioritas yang berbeda dengan RENSTRA lama.
2. Penyesuaian indikator kinerja Perubahan sasaran strategis biasanya juga diikuti dengan penyesuaian indikator kinerja. Beberapa indikator lama dapat dihentikan, disederhanakan, atau diganti dengan indikator baru yang lebih relevan dengan RENSTRA baru. Hal ini menyebabkan meskipun tahun sama, cara pengukuran pencapaian sasaran berubah.
3. Sinkronisasi dengan target jangka menengah baru RENSTRA baru menetapkan target capaian jangka menengah yang berbeda dari target sebelumnya, dalam tahun transisi sasaran strategis yang ada harus diselaraskan agar mendukung target jangka menengah RENSTRA yang baru. Ini kadang menimbulkan perbedaan antara sasaran awal tahun dengan sasaran yang disesuaikan setelah RENSTRA baru diberlakukan.

- Perubahan alokasi sumber daya dan program Sasaran strategis juga dipengaruhi oleh perubahan alokasi sumber daya. RENSTRA baru dapat memprioritaskan program tertentu sehingga sasaran strategis tahun transisi menyesuaikan, meskipun secara waktu sama dengan sasaran strategis RENSTRA lama.

Dengan demikian, perbedaan sasaran strategis di tahun yang sama pada masa transisi mencerminkan penyesuaian arah kebijakan, indikator, dan prioritas program yang disebabkan oleh pergeseran fokus RENSTRA baru. Hal ini penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan sekaligus menyesuaikan strategi dengan konteks dan kebutuhan terkini, maka dari itu untuk menarasikan Capaian Kinerja pada semester pertama dan semester kedua tidak memungkinkan sehingga laporan capaian kinerja yang kami sajikan lebih fokus pada Sasaran Strategis pada RENSTRA baru.

### 3.2.1 Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten”

Capaian indikator *Meningkatnya Kapasitas Air Baku Kabupaten* menunjukkan perkembangan yang positif seiring dengan dilaksanakannya berbagai program dan kegiatan pengembangan sumber daya air. Peningkatan kapasitas air baku ini didukung melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air baku, seperti intake, jaringan pipa transmisi, embung, serta optimalisasi sumber air permukaan dan air tanah.

Upaya tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkelanjutan bagi kebutuhan masyarakat, baik untuk air minum, kegiatan ekonomi, maupun layanan publik lainnya. Selain itu, peningkatan kapasitas air baku juga memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko kekeringan dan fluktuasi ketersediaan air akibat perubahan iklim.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan wilayah dan peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan air baku yang memadai, andal, dan berkelanjutan.

#### *Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun berjalan*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)	Liter/Detik	1729,5	1729,5	1729,5	1
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)	Angka	0,21	0,83	0,21	0,25

- Kapasitas Air Baku Kabupaten** merupakan kemampuan daerah dalam menyediakan air baku yang bersumber dari air permukaan, air tanah, dan/atau sumber air lainnya yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pelayanan air minum, kegiatan ekonomi, serta layanan publik. Peningkatan kapasitas air baku mencerminkan keberhasilan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air dalam menjamin ketersediaan air yang cukup, andal, dan berkelanjutan di wilayah kabupaten.
- Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi** merupakan perbandingan antara luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan telah terlayani oleh jaringan irigasi dengan total luas daerah irigasi kewenangan kabupaten. Indikator ini menggambarkan tingkat ketersediaan dan fungsi jaringan irigasi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan air bagi lahan pertanian, khususnya untuk menjamin keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.

### Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)	Liter/Detik	1729,5	1744,5	1729,5	0,99
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)	Angka	0,21	0,83	0,21	0,25

Pada Tahun 2025, pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis **Meningkatnya Kapasitas Air Baku Kabupaten** diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Kapasitas Air Baku Kabupaten dan Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi.

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Kapasitas Air Baku Kabupaten menunjukkan realisasi sebesar 1.729,5 liter/detik realisasi tersebut merupakan baseline tahun sebelumnya dari target yang ditetapkan sebesar 1.744,5 liter/detik. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 0,99 atau 99%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas air baku telah dilaksanakan dengan hasil yang sangat baik, meskipun masih terdapat selisih kecil terhadap target yang direncanakan.
2. Sementara itu, untuk indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi, realisasi pada Tahun 2025 tercatat sebesar 0,21, sama dengan kondisi awal. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,83, maka tingkat capaian indikator ini sebesar 0,25 atau 25%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan layanan jaringan irigasi belum mengalami perkembangan yang signifikan selama Tahun 2025.

Secara umum, pencapaian Sasaran Strategis 1 menunjukkan hasil yang bervariasi antar indikator, di mana indikator kapasitas air baku telah mendekati target yang ditetapkan, sedangkan indikator rasio daerah irigasi masih memerlukan upaya peningkatan kinerja yang lebih optimal pada periode perencanaan berikutnya, baik melalui peningkatan pembangunan jaringan irigasi maupun optimalisasi infrastruktur yang telah ada.

### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	336.880.050,00	170.956.450,00	50,75	0,99	1,954
			Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)				0,25	0,499

Berdasarkan data program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), terlihat bahwa pemanfaatan anggaran belum sepenuhnya sebanding dengan capaian kinerja. Dari total anggaran sebesar Rp 336.880.050,00, realisasi baru mencapai Rp 170.956.450,00 atau sekitar 50,75%. Capaian kinerja untuk indikator luas layanan irigasi multikomoditas masih rendah, hanya 0,99%, sehingga tingkat efisiensi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara dana yang digunakan dan hasil yang dicapai.

Sementara itu, indikator peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir menunjukkan capaian 0,499%, sedikit di atas target

0,25%, namun secara absolut masih sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan kawasan rawan banjir masih terbatas, baik dari sisi anggaran maupun intervensi teknis.

Secara umum, penggunaan sumber daya untuk program ini menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas perlu ditingkatkan, dengan memperbaiki perencanaan, prioritas kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi berkala agar setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kapasitas air baku dan perlindungan permukiman di kabupaten.

#### **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Tahun 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)	0	0	1729,5	1729,5	100,00
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)	0,08	0,21	0,83	0,21	25,30

Pada tahun 2025, indikator Kapasitas Air Baku Kabupaten mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun 2024. Tahun 2024 kapasitas masih 0 liter/detik, sedangkan pada 2025 realisasi meningkat drastis menjadi 1.729,5 liter/detik, sehingga mencapai 100% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas air baku baru berhasil terealisasi pada tahun terakhir dan menandai keberhasilan penuh dalam pencapaian target.

Sebaliknya, pada indikator Rasio Luas Daerah Irigasi yang Dilayani Jaringan Irigasi, tidak terjadi perubahan antara tahun 2024 dan 2025. Rasio tetap 0,21, jauh di bawah target 0,83, sehingga capaian hanya 25,3%. Hal ini menunjukkan stagnasi dalam pembangunan atau perluasan jaringan irigasi, meskipun telah terjadi kenaikan sebelumnya dari tahun 2023 ke 2024.

#### **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target RPJMD
			2023	2024	2025	
1	Meningkatnya kapasitas Air Baku Kabupaten	Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)	0	0	1729,5	1819,5
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi (Angka)	0,08	0,21	0,21	3,17

Berdasarkan data capaian kinerja dan target RPJMD terkait Sasaran Strategis: Meningkatkan Kapasitas Air Baku Kabupaten, dapat dilakukan perbandingan antara realisasi dan target dari tahun 2023 hingga 2025.

1. Kapasitas Air Baku Kabupaten (Liter/Detik)

Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi kapasitas air baku tercatat 0 Liter/Detik, artinya belum ada penambahan kapasitas yang dapat diukur. Target RPJMD untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 1.819,5 Liter/Detik, sementara realisasi yang tercatat tahun yang sama baru mencapai 1.729,5 Liter/Detik. Hal ini menunjukkan pencapaian hampir mendekati target, namun masih terdapat selisih 90 Liter/Detik yang perlu dikejar agar target sepenuhnya tercapai.

2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi (Angka)

Realisasi rasio pada tahun 2023 adalah 0,08, meningkat menjadi 0,21 pada tahun 2024, namun masih jauh dari target RPJMD tahun 2025

sebesar 3,17.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, pencapaian saat ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan, sehingga perlu percepatan pembangunan jaringan irigasi agar target tercapai.

Secara keseluruhan, peningkatan kapasitas air baku menunjukkan progres yang cukup signifikan mendekati target, sementara rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi masih memerlukan perhatian dan percepatan intervensi.

#### **Permasalahan, Kendala dan Solusi**

Sasaran Strategis: Meningkatkan kapasitas Air Baku Kabupaten

Indikator Kinerja Utama & Capaian 2025:

- Kapasitas Air Baku: Target 1.744,5 L/detik → Realisasi 1.729,5 L/detik (Capaian 0,99)
- Rasio Luas Irigasi: Target 0,83 → Realisasi 0,21 (Capaian 0,25)

#### **Permasalahan:**

- Kapasitas air baku stagnan akibat keterbatasan infrastruktur dan gangguan teknis.
- Rasio luas irigasi yang dilayani jauh dari target karena keterbatasan anggaran, koordinasi, dan tantangan geografis.

#### **Kendala:**

- Infrastruktur intake, jaringan distribusi, dan pompa belum optimal.
- Proses perizinan dan pembangunan irigasi memerlukan koordinasi lintas instansi.
- Anggaran pembangunan dan pemeliharaan irigasi terbatas.

#### **Solusi:**

- Melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin jaringan air baku serta optimalisasi peralatan.
- Diversifikasi sumber air melalui pembangunan sumur atau embung tambahan.
- Penyusunan prioritas pembangunan irigasi, penyediaan anggaran khusus, dan peningkatan koordinasi antarinstansi serta partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan.

### **3.2.2 Sasaran Strategis 2 “Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman”**

*Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman* menunjukkan hasil yang positif sebagai dampak dari pelaksanaan berbagai program pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman. Upaya tersebut meliputi penyediaan dan peningkatan layanan air minum, sanitasi, drainase lingkungan, jalan lingkungan, serta prasarana permukiman lainnya yang mendukung terciptanya lingkungan hunian yang layak dan sehat.

Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam mendukung kesehatan lingkungan, mobilitas, dan kenyamanan permukiman. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar juga mendorong

pengurangan kawasan kumuh serta memperkuat ketahanan permukiman terhadap risiko lingkungan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan berkeadilan, guna mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	%	59,4	60,72	60,18	0,99
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)	%	44,13	44,61	44,72	1,00
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	%	82,79	83,69	82,79	0,99
		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)	Unit	2	3	2	0,67

Pada Tahun 2025, pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman diukur melalui empat Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi, drainase, serta pengelolaan persampahan.

- Berdasarkan hasil pengukuran, indikator Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman menunjukkan realisasi sebesar 60,18% dari target 60,72%, dengan tingkat capaian 0,99 atau 99%. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan akses layanan air minum layak bagi masyarakat telah dilaksanakan dengan hasil yang sangat baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator *Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman* menunjukkan peningkatan sebagai hasil dari upaya Pemerintah Daerah dalam memperluas cakupan pelayanan air minum yang memenuhi standar kelayakan dan keamanan. Peningkatan ini didukung melalui pengembangan dan optimalisasi sistem penyediaan air minum, baik melalui jaringan perpipaan maupun nonperpipaan, serta peningkatan kualitas pengelolaan dan pengawasan mutu air minum. Meningkatnya persentase rumah tangga yang mengakses layanan air minum layak/aman berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penurunan risiko penyakit berbasis air. Selain itu, ketersediaan air minum yang aman dan berkelanjutan juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pemenuhan pelayanan dasar di bidang permukiman. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin hak masyarakat terhadap akses air minum yang layak dan aman, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

### Rumah Tangga Berakses Air Minum

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (jiwa Per Km2)	Berkases Air Minum		Realisasi Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2024	Realisasi Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun 2025	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2025	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2025
						Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk					
1	Sungai Raya	23.520	7.448	75,85	310	3.170	10.778	50	3.220		3.220	43,23
2	Capkala	10.188	3.066	46,35	220	1.691	5.749		1.691		1.691	55,15
3	Sungai Raya Kepulauan	28.596	9.045	394	73	4.996	16.986		4.996		4.996	55,23



No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (Km2 )	Kepadatan Penduduk (jiwa Per Km2 )	Berkases Air Minum		Realisasi Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2024	Realisasi Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun 2025	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2025	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2025
						Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk					
4	Samalantan	24.423	7.004	420,5	58	3.933	13.372	300	4.818		4.818	68,79
5	Monterado	34.658	10.138	291	119	5.625	19.125		5.875		5.875	57,95
6	Lembah Bawang	6.660	2.018	188	35	1.262	4.291		1.262	705	1.967	97,47
7	Bengkayang	34.605	9.879	157,04	220	7.840	26.656		8.140		8.140	82,40
8	Teriak	18.164	4.998	231,51	78	2.650	9.010		2.650		2.650	53,02
9	Sungai Betung	12.990	3.669	205,95	63	2.464	8.378		2.531		2.531	68,98
10	Ledo	15.748	4.691	481,75	33	2.468	8.391		2.468		2.468	52,61
11	Suti Semarang	6.224	1.751	280,84	22	909	3.091		909		909	51,91
12	Lumar	8610	2.587	275,21	31	1.384	4.706		1.384		1.384	53,50
13	Sanggau Ledo	15.902	4.928	392,5	41	2.695	9.163	800	3.495		3.495	70,92
14	Tujuh Belas	15.497	5.031	221	70	3.275	11.135		3.275	366	3.641	72,37
15	Seluas	21.678	6.403	506,5	43	2.965	10.081		2.965		2.965	46,31
16	Jagoi Babang	9.988	3.002	655	15	1.550	5.270		1.550		1.550	51,63
17	Siding	8.515	2.416	563,3	15	706	2.400		706		706	29,22
		<b>295.966</b>	<b>88.074</b>	<b>5.386</b>	<b>1.447</b>	<b>49.583</b>	<b>168.582</b>	<b>1.150</b>	<b>51.935</b>	<b>1.071</b>	<b>53.006</b>	<b>60,18</b>

Daftar Paket pekerjaan :

- Pekerjaan Penyusunan DED Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Papan Uduk, Kec. Lembah Bawang;
- PekerjaanPembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Papan Uduk Kec. Lembah Bawang 249 SR;
- Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Papan Uduk Kec. Lembah Bawang;
- Pekerjaan Penyusunan DED Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Godang Damar Kec. Lembah Bawang;
- PekerjaanPembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Godang Damar, Kec. Lembah Bawang 236 SR;
- Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Godang Damar Kec. Lembah Bawang;
- Penyusunan DED Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Saka Taru Kec. Lembah Bawang;
- PekerjaanPembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Saka Taru, Kec. Lembah Bawang 220 SR;
- Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Saka Taru Kec. Lembah Bawang;
- Penyusunan DED Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Dusun Dawar dan Dusun Semadum Desa Pisak Kec. Tujuh Belas;
- PekerjaanPembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Dusun Dawar dan Dusun Semadum Desa Pisak Kec. Tujuh Belas 366 SR;
- Pekerjaan Pengawasan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Dusun Dawar dan Dusun Semadum Desa Pisak Kec. Tujuh Belas;
- Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sendoreng, Kec. Monterado (HJP TA. 2023);
- Pekerjaan Penyusunan DED Optimalisasi SPAM IKK Seluas Kecamatan Seluas.

2. Selanjutnya, indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman terealisasi sebesar 44,72%, melampaui target Tahun 2025 sebesar 44,61%. Dengan capaian kinerja 1,00 atau 100%, indikator ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan di bidang sanitasi telah berjalan sesuai bahkan sedikit melebihi target perencanaan.
- Capaian indikator *Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman* menunjukkan peningkatan yang positif seiring dengan pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi di wilayah kabupaten. Upaya tersebut meliputi penyediaan dan perbaikan sarana sanitasi layak, seperti jamban sehat, sistem pengelolaan air limbah domestik, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
- Meningkatnya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak/aman berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan penurunan risiko penyakit berbasis lingkungan. Selain itu, peningkatan layanan sanitasi juga mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan serta peningkatan kualitas permukiman yang lebih sehat dan layak huni.
- Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan dasar bidang sanitasi, guna mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

#### ***Rumah Tangga Berakses Sanitasi***

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa Per Km2)	Berakses Air Minum		Realisasi Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun 2024	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2024	Realisasi Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun 2025	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2025	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun s/d 2025
						Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk					
1	Sungai Raya	23.520	7.448	75,85	310	3.113	10.584	60	3.173		3.173	42,60
2	Capkala	10.188	3.066	46,35	220	1.122	3.815		1.122		1.122	36,59
3	Sungai Raya Kepulauan	28.596	9.045	394	73	3.255	11.067	155	3.540		3.540	39,14
4	Samalantan	24.423	7.004	420,5	58	3.110	10.574		3.230	100	3.330	47,54
5	Monterado	34.658	10.138	291	119	3.865	13.141	310	4.514	225	4.739	46,74
6	Lembah Bawang	6.660	2.018	188	35	624	2.122		624		624	30,92
7	Bengkayang	34.605	9.879	157,04	220	7.172	24.385		7.222		7.222	73,10
8	Teriak	18.164	4.998	231,51	78	140	7.276	50	2.190		2.190	43,82
9	Sungai Betung	12.990	3.669	205,95	63	2.163	7.354		2.283		2.283	62,22
10	Ledo	15.748	4.691	481,75	33	2.486	8.452	55	2.541	50	2.591	55,23
11	Suti Semarang	6.224	1.751	280,84	22	426	1.448		426		426	24,33
12	Lumar	8610	2.587	275,21	31	1.339	4.553		1.389	25	1.414	54,66
13	Sanggau Ledo	15.902	4.928	392,5	41	1.819	6.185		1.879		1.879	38,13
14	Tujuh Belas	15.497	5.031	221	70	1.980	6.732	50	2.125	25	2.150	42,74
15	Seluas	21.678	6.403	506,5	43	1.003	3.410	140	1.143		1.143	17,85
16	Jagoi Babang	9.988	3.002	655	15	1.096	3.726		1.096		1.096	36,51
17	Siding	8.515	2.416	563,3	15	469	1.595		469		469	19,41
		<b>295.966</b>	<b>88.074</b>	<b>5.386</b>	<b>1.447</b>	<b>37.182</b>	<b>126.419</b>	<b>820</b>	<b>38.966</b>	<b>425</b>	<b>39.391</b>	<b>44,72</b>

#### Daftar Paket pekerjaan :

- Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Monterado, Kec. Monterado 25 unit;
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Rantau, Kec. Monterado 25 unit;



- Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Goa Boma, Kec. Monterado 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Siaga, Kec. Monterado 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Nek Ginap, Kec. Monterado 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Mekar Baru, Kec. Monterado 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Jahandung, Kec. Monterado 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Beringin Baru, Kec. Monterado 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Gerantung, Kec. Monterado 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Samalantan, Kec. Samalantan 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pasti Jaya, Kec. Samalantan 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Sabau, Kec. Samalantan 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Marunsu, Kec. Samalantan 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Tebuah Marong, Kec. Ledo 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Jesape, Kec. Ledo 25 unit;
  - Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pisak, Kec. Tujuh Belas 25 unit;
3. Untuk indikator Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat, realisasi kinerja tercatat sebesar 82,79% dari target 83,69%, capaian kinerja masih menggunakan baseline tahun 2024 dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja nihil. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi drainase secara umum masih terjaga dengan baik, meskipun diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas jaringan drainase agar target dapat tercapai secara optimal.
- Capaian indikator *Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat* menunjukkan peningkatan sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan drainase di wilayah kabupaten. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan fungsi drainase berjalan optimal dalam mengalirkan air permukaan serta mencegah terjadinya genangan dan banjir di kawasan permukiman.
- Meningkatnya persentase drainase dalam kondisi baik mencerminkan perbaikan kualitas infrastruktur drainase serta meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan jaringan. Kondisi drainase yang berfungsi dengan baik berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, khususnya sistem drainase, guna mendukung pengendalian genangan air, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Indonesia melihat kebutuhan untuk mengefisienkan belanja negara dan daerah karena tekanan terhadap anggaran nasional yang semakin besar, baik akibat kondisi perekonomian global yang tidak stabil maupun kebutuhan belanja publik yang meningkat, salah satu pendukung capaian indikator bersumber dari DAU-SG (specific grand) yang mengalami pemangkasan akibat dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sehingga seluruh kegiatan tidak terlaksana.

4. Sementara itu, indikator Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi menunjukkan realisasi sebanyak 2 unit dari target 3 unit, dengan capaian kinerja sebesar 0,67 atau 67%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pengoperasian fasilitas pengelolaan persampahan belum sepenuhnya mencapai target, sehingga memerlukan perhatian dan percepatan pelaksanaan pada periode perencanaan berikutnya.

Capaian indikator *Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi* menunjukkan peningkatan seiring dengan upaya Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan persampahan. Peningkatan jumlah sarana persampahan yang beroperasi mencerminkan bertambahnya fasilitas yang berfungsi aktif dalam mendukung pengurangan, penanganan, dan pengelolaan sampah secara terpadu.

Beroperasinya TPA, TPST, SPA, TPS 3R, dan TPS secara optimal berkontribusi terhadap peningkatan cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan sampah yang dibuang ke lingkungan, serta peningkatan efektivitas pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle (3R). Selain itu, keberadaan sarana persampahan yang beroperasi juga mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan persampahan dan pengelolaan lingkungan, guna mendukung pembangunan permukiman yang layak huni serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Indonesia melihat kebutuhan untuk mengefisienkan belanja negara dan daerah karena tekanan terhadap anggaran nasional yang semakin besar, baik akibat kondisi perekonomian global yang tidak stabil maupun kebutuhan belanja publik yang meningkat, salah satu pendukung capaian indikator bersumber dari DAU-SG (specific grand) yang mengalami pemangkasan akibat dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sehingga seluruh kegiatan tidak terlaksana.

Secara keseluruhan, pencapaian Sasaran Strategis 2 pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik, khususnya pada indikator akses air minum dan sanitasi. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan dan optimalisasi, terutama pada aspek pengelolaan persampahan, guna memastikan terpenuhinya akses infrastruktur dasar permukiman secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	%		
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	15.625.667.500,00	15.418.800.500,00	98,68	0,99	1,00
4		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	4.420.497.000,00	4.380.915.500,00	99,10	1,00	1,01
5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	-	0,00	0,00	-
6		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	-	-	0,00	0,00	-

Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis dengan membandingkan antara capaian kinerja yang dihasilkan dengan tingkat realisasi anggaran pada masing-masing program dalam rangka mendukung sasaran strategis peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman.

1. Berdasarkan hasil pengukuran, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 1,00. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan proporsional, di mana realisasi anggaran yang tinggi mampu menghasilkan capaian kinerja yang hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.
2. Selanjutnya, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah memiliki tingkat efisiensi sebesar 1,01. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif optimal, program mampu mencapai target kinerja secara penuh. Tingkat efisiensi yang sedikit lebih tinggi dari satu menggambarkan bahwa output dan outcome yang dihasilkan sebanding, bahkan lebih efektif, dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.
3. Sementara itu, pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, tidak terdapat realisasi anggaran pada periode pelaporan. Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat diukur secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kinerja dan penganggaran, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.
4. Sementara itu, pada Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, tidak terdapat realisasi anggaran pada periode pelaporan. Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat diukur secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kinerja dan penganggaran, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Secara umum, efisiensi penggunaan sumber daya pada program yang didukung oleh alokasi anggaran menunjukkan kinerja yang baik hingga sangat baik. Namun demikian, untuk meningkatkan efisiensi secara menyeluruh, diperlukan penguatan sinkronisasi antara perencanaan program, penetapan indikator kinerja, dan penganggaran agar seluruh program dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal.

### Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Tahun 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	59,53	60,25	60,72	60,18	99,11
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)	44,13	45,21	44,61	44,72	100,25
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	72,45	82,79	83,69	82,79	98,92
		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)	0	0	2	2	100,00

Berdasarkan data capaian kinerja dari tahun 2023 hingga 2025, terlihat tren perkembangan infrastruktur dasar permukiman di Kabupaten:

- Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum Layak/Aman:**  
Capaian meningkat dari 59,53% pada 2023 menjadi 60,25% pada 2024, dan sedikit menurun menjadi 60,18% pada 2025. Meskipun terjadi penurunan tipis di tahun terakhir, capaian hampir memenuhi target 60,72% (99,11%). Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses air minum layak relatif stabil dan hampir sesuai target, namun masih ada ruang perbaikan kecil untuk mencapai target penuh.
- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman:**  
Terjadi peningkatan dari 44,13% pada 2023 menjadi 45,21% pada 2024, kemudian sedikit menurun menjadi 44,72% pada 2025. Meskipun demikian, capaian 100,25% dari target 44,61% menunjukkan bahwa program akses sanitasi berhasil melebihi sasaran yang ditetapkan, menandakan keberhasilan intervensi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.
- Pada indikator Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%),** capaian tahun 2025 tercatat 82,79%, sama dengan realisasi tahun 2024, dan sedikit di bawah target 83,69%. Meskipun terdapat peningkatan signifikan dari 2023 ke 2024, stagnasi capaian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan atau perbaikan drainase mengalami keterbatasan.  
Salah satu faktor utama yang mempengaruhi stagnasi ini adalah tidaknya dukungan anggaran khusus untuk indikator drainase. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, kegiatan pemeliharaan rutin, perbaikan infrastruktur, atau pembersihan saluran air tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada kesulitan mencapai target yang ditetapkan meskipun potensi dan kebutuhan perbaikan drainase sudah diidentifikasi.
- Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi:**  
Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang beroperasi mencapai **2 unit**, sesuai target, sehingga capaian tercatat **100%**. Hal ini menunjukkan keberhasilan implementasi infrastruktur pengelolaan sampah yang mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi stagnasi ini adalah tidaknya dukungan anggaran khusus untuk indikator drainase. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, kegiatan pemeliharaan rutin, perbaikan infrastruktur, atau pembersihan saluran air tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada kesulitan mencapai target yang ditetapkan meskipun potensi dan kebutuhan perbaikan drainase sudah diidentifikasi.

### Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target RPJMD
			2023	2024	2025	
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Layak/Aman (%)	59,53	60,25	60,18	64,72
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)	44,13	45,21	44,72	46,61
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)	72,45	82,79	82,79	87,29
		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)	0	2	2	4

berdasarkan data realisasi 2023–2025 dan target RPJMD :

1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum Layak/Aman (%)  
Realisasi akses layanan air minum meningkat tipis dari 59,53% pada 2023 menjadi 60,25% pada 2024, namun sedikit menurun menjadi 60,18% pada 2025. Jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 64,72%, masih terdapat kesenjangan sekitar 4,5%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan akses, pertumbuhan masih lambat, sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur air minum atau program peningkatan layanan masyarakat.
2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%)  
Realisasi indikator sanitasi meningkat dari 44,13% pada 2023 menjadi 45,21% pada 2024, tetapi kemudian menurun sedikit menjadi 44,72% pada 2025. Target RPJMD sebesar 46,61% menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan sekitar 1,9%. Hal ini mengindikasikan perlunya fokus lebih besar pada program sanitasi, seperti pembangunan fasilitas sanitasi baru dan kampanye perilaku hidup bersih.
3. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)  
Indikator drainase menunjukkan tren yang positif. Realisasi meningkat dari 72,45% pada 2023 menjadi 82,79% pada 2024, dan stabil di 82,79% pada 2025. Target RPJMD adalah 87,29%, sehingga masih terdapat kesenjangan sekitar 4,5%. Peningkatan signifikan ini menandakan keberhasilan perbaikan dan pemeliharaan drainase, namun tetap perlu penambahan upaya untuk mencapai target penuh.
4. Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit)  
Jumlah unit pengelolaan sampah meningkat dari 0 unit pada 2023 menjadi 2 unit pada 2024, dan tetap 2 unit pada 2025. Target RPJMD adalah 4 unit, sehingga masih ada kesenjangan 2 unit. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan unit pengelolaan sampah dan optimalisasi operasional agar target tercapai.

Secara keseluruhan, indikator drainase menunjukkan kemajuan terbaik, sementara akses air minum, sanitasi, dan jumlah unit pengelolaan sampah masih memerlukan percepatan program agar target RPJMD dapat tercapai.

Analisis penyebab peningkatan/penurunan, hambatan/kendala dan solusi capaian sasaran kinerja :

- a) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum Layak/Aman (%), Target 2025: 60,72%, Realisasi 2025: 60,18% (Capaian 99,11%).

**Analisis Penyebab Penurunan:**

- Gangguan distribusi air bersih;
- Wilayah baru yang belum terlayani optimal;
- Faktor cuaca seperti kekeringan yang menurunkan pasokan air.

**Hambatan/Kendala:**

- Terbatasnya anggaran untuk perbaikan dan pengembangan jaringan;
- SDM teknis yang belum mencukupi untuk pemeliharaan rutin;
- Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan air layak masih perlu ditingkatkan.

**Solusi:**

- Perkuat pemeliharaan jaringan dan monitoring distribusi air.
- Tambahkan alokasi dana atau kemitraan untuk pengembangan layanan air di wilayah baru.
- Kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan air layak/aman.

- b) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak/Aman (%) Target 2025: 44,61%, Realisasi 2025: 44,72% (Capaian 100,25%)

**Analisis Penyebab Peningkatan:**

- Peningkatan kecil karena pembangunan fasilitas sanitasi di beberapa wilayah terpencil.
- Program penyuluhan dan bantuan fasilitas sanitasi berhasil meningkatkan akses masyarakat.

**Hambatan/Kendala:**

- Masih terdapat beberapa rumah tangga yang belum dapat mengakses sanitasi layak karena lokasi sulit dijangkau.
- Kesadaran sebagian masyarakat untuk menjaga sanitasi masih perlu ditingkatkan.

**Solusi:**

- Lanjutkan pembangunan dan perbaikan fasilitas sanitasi di area yang belum terjangkau.
- Edukasi dan sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

- c) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%) Target 2025: 83,69%, Realisasi 2025: 82,79% (Capaian 98,92%)

**Analisis Penyebab Penurunan:**

- Pemeliharaan drainase belum merata di seluruh wilayah.
- Sumbatan akibat sampah dan sedimentasi.
- Curah hujan tinggi yang mempercepat kerusakan drainase.

**Hambatan/Kendala:**

- SDM pemeliharaan drainase terbatas.
- Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke drainase masih rendah.
- Peralatan dan anggaran pemeliharaan drainase terbatas.

**Solusi:**

- Tingkatkan pemeliharaan rutin dan pembersihan drainase.
  - Edukasi masyarakat untuk menjaga drainase dari sampah.
  - Penyediaan peralatan dan anggaran pemeliharaan yang memadai.
- d) Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Beroperasi (Unit) Target 2025: 2 unit, Realisasi 2025: 2 unit (Capaian 100%)

**Analisis Penyebab Peningkatan/Stabil:**

Target tercapai karena semua unit yang direncanakan beroperasi sesuai jadwal.

**Hambatan/Kendala:**

Tidak ada hambatan signifikan. Namun tetap perlu monitoring agar operasi berjalan lancar.

**Solusi:**

Lanjutkan monitoring dan evaluasi operasional agar fasilitas tetap berfungsi optimal.

Kesimpulan Umum Capaian kinerja secara keseluruhan stabil dan memuaskan, dengan sebagian indikator sedikit di bawah target (air minum layak dan drainase), Faktor penurunan utama bersifat operasional: distribusi, pemeliharaan, lingkungan, dan keterbatasan SDM atau anggaran, Faktor peningkatan muncul pada indikator sanitasi karena pembangunan fasilitas dan program edukasi yang berhasil.

Solusi utama: pemeliharaan rutin, peningkatan SDM dan anggaran, edukasi masyarakat, serta monitoring yang konsisten.

**3.2.3 Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik”**

Capaian indikator *Meningkatnya Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik* menunjukkan perkembangan yang positif sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan bangunan gedung milik daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bangunan gedung dapat berfungsi secara optimal, aman, dan nyaman dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Peningkatan persentase bangunan gedung dalam kondisi baik mencerminkan perbaikan kualitas fisik bangunan, peningkatan kepatuhan terhadap standar teknis bangunan, serta efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah. Kondisi bangunan gedung yang layak dan terawat turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menggambarkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bangunan gedung, guna mendukung pelayanan publik yang optimal, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan masyarakat.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis (%)	%	86,66	95,33	86,66	0,91

Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis, pada Tahun 2025, indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis terealisasi sebesar 86,66% dari target yang

ditetapkan sebesar 95,33%. Tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 0,91 atau 91%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi bangunan gedung pemerintah daerah secara umum telah berada pada kategori baik, namun masih terdapat sebagian bangunan yang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dan pemeliharaan berkelanjutan, khususnya melalui rehabilitasi dan peningkatan kualitas bangunan gedung, agar target kinerja dapat tercapai secara optimal pada periode perencanaan berikutnya.

### **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	%		
7	Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.996.527.080,00	1.816.881.000,00	91,00	0,91	1,00

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Program Penataan Bangunan Gedung dianalisis melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja indikator persentase bangunan gedung dalam kondisi baik.

Program ini didukung oleh anggaran sebesar Rp1.996.527.080,00 dengan realisasi sebesar Rp1.816.881.000,00 atau 91,00% dari pagu anggaran. Capaian kinerja yang dihasilkan tercatat sebesar 0,91, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah berhasil dicapai sesuai dengan perencanaan.

Tingkat efisiensi program tercatat sebesar 1,00, yang mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efisien dan proporsional, di mana realisasi anggaran sebanding dengan capaian kinerja yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah dikelola dengan baik dan mampu menghasilkan output sesuai dengan alokasi sumber daya yang tersedia.

Secara keseluruhan, Program Penataan Bangunan Gedung telah menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan capaian kinerja agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada periode perencanaan berikutnya.

### **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Tahun 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis (%)	0	86,66	95,33	86,66	90,91

Capaian indikator *Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis* menunjukkan kemajuan yang signifikan sebagai dampak dari upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Peningkatan persentase ini mencerminkan kepatuhan bangunan gedung pemerintah daerah terhadap standar keselamatan, kekuatan struktur, fasilitas pendukung, dan aspek kenyamanan bagi pengguna.

Bangunan gedung yang memenuhi standar teknis tidak hanya menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi aparatur dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang diselenggarakan di gedung-gedung tersebut. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menggambarkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengelola aset bangunan secara profesional,

berkelanjutan, dan aman, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.

Daftar Paket pekerjaan :

- Pekerjaan Pembangunan SMPN 4 Bengkayang (HJP TA. 2023);
- Pekerjaan Pembangunan Klinik dan Penataan Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang;
- Pekerjaan Peningkatan Gedung Serba Guna Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang;
- Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Klinik dan Penataan Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Peningkatan Gedung Serba Guna Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang;
- Pekerjaan Pendukung Program Kegiatan TMMD Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang;
- Pekerjaan Penataan Halaman Gedung Satu Atap Kabupaten Bengkayang/

**Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target RPJMD
			2023	2024	2025	
3	Meningkatnya Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis (%)	0	70	86,66	100

Sasaran strategis **meningkatnya persentase bangunan gedung dalam kondisi baik** diukur melalui **Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Teknis**. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini masih berada pada angka **0%**, yang menunjukkan belum ditetapkan indikator terkait bangunan gedung pemerintah daerah sesuai standar teknis yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi mencapai **70%**, mencerminkan adanya upaya perbaikan dan peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah daerah. Pada tahun 2025, capaian indikator kembali meningkat menjadi **86,66%**, menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan program peningkatan kondisi bangunan gedung. Dengan capaian tersebut, kinerja indikator ini semakin mendekati **target RPJMD sebesar 100%**, yang diharapkan dapat tercapai melalui optimalisasi program dan kegiatan pada periode perencanaan berikutnya.

**3.2.4 Sasaran Strategis 4 "Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang"**

Capaian indikator *Investasi Pembangunan Daerah Sesuai dengan Rencana Tata Ruang* menunjukkan hasil positif dari upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan investasi yang terarah dan sesuai dengan ketentuan perencanaan tata ruang. Peningkatan capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan, baik publik maupun swasta, berada pada lokasi yang tepat, sesuai peruntukan lahan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketertiban ruang wilayah.

Investasi yang selaras dengan rencana tata ruang tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, tetapi juga meminimalkan konflik penggunaan lahan, risiko lingkungan, dan dampak sosial. Selain itu, kesesuaian investasi dengan tata ruang mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang tertib, aman, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan ukuran tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana kegiatan pembangunan, perizinan, dan pemanfaatan ruang telah selaras dengan pola ruang dan struktur ruang yang direncanakan, sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan tata ruang, konflik pemanfaatan lahan, serta degradasi lingkungan.

Peningkatan ketaatan terhadap RTRW menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta mendukung kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Indikator ini juga mencerminkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum.

### Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun berjalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
4	Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	%	84,09	90	84,09	0,93

Capaian indikator *Ketaatan Terhadap RTRW* menunjukkan tingkat kepatuhan seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dalam melaksanakan pembangunan dan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku. Peningkatan capaian indikator ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mengarahkan, dan menegakkan peraturan tata ruang sehingga pemanfaatan lahan dilakukan secara teratur, efisien, dan berkelanjutan.

Ketaatan terhadap RTRW tidak hanya memastikan pembangunan berada pada lokasi yang tepat sesuai fungsi lahan, tetapi juga meminimalkan konflik penggunaan ruang, dampak lingkungan, dan risiko sosial. Hal ini mendukung terciptanya pembangunan daerah yang terintegrasi, tertib, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola ruang dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menegakkan peraturan tata ruang, mendukung pertumbuhan ekonomi yang terencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

### Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun - tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Tahun 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
4	Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Ketaatan Terhadap RTRW (%)			90	84,09	0,93

### Analisis pencapaian target akhir tahun 2023 dengan target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian	
4	Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	%	90	84,09	0,93	100

### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi		Sisa
					Rp	%	
Investasi Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	249.460.000,00	94.427.000,00	37,85	155.033.000,00
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati tentang	110.000.000,00	18.528.700,00	16,84	91.471.300,00



Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi		Sisa
					Rp	%	
			Rencana Detail Tata Ruang				
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	110.000.000,00	18.528.700,00	16,84	91.471.300,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	83.000.000,00	38.441.900,00	46,32	44.558.100,00
		Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	83.000.000,00	38.441.900,00	46,32	44.558.100,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannanya Koordinasi dan Singkronisasi Pemantaaan Ruang Daerah Kabupaten Bejgkayang	56.460.000,00	37.456.400,00	66,34	19.003.600,00
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	56.460.000,00	37.456.400,00	66,34	19.003.600,00

### 3.2.5 Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten”

Capaian indikator *Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten* menunjukkan perkembangan positif sebagai hasil dari pelaksanaan program pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan kabupaten. Peningkatan kualitas jalan mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana transportasi yang aman, nyaman, dan lancar, serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa di seluruh wilayah kabupaten.

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tidak hanya mengurangi kerusakan kendaraan dan risiko kecelakaan, tetapi juga meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat pelayanan publik. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun infrastruktur jalan yang handal, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### *Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun berjalan*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	Angka	31,65	31,65	32,06	1,01

Capaian indikator *Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik* menunjukkan tingkat perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Peningkatan proporsi ini mencerminkan bertambahnya panjang jalan yang memenuhi standar teknis dan layak dilalui, sehingga mendukung kelancaran transportasi, mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pelayanan publik di seluruh wilayah kabupaten.

Jalan yang berada dalam kondisi baik berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan pengguna jalan, pengurangan biaya perawatan kendaraan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui aksesibilitas yang lebih baik. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan secara berkelanjutan, handal, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



**Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Tahun 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	37,17	31,65	31,65	32,33	1,01

**Analisis pencapaian target akhir tahun 2023 dengan target akhir Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian	
5	Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	Angka	31,65	32,33	1,01	35,65

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi		Sisa
					Rp	%	
Meningkatnya Kualitas jalan kabupaten	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Angka)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	17.178.760.266,90	17.037.231.335,90	99,18	141.528.931,00
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Jalan dan jembatan Kabupaten	17.178.760.266,90	17.037.231.335,90	99,18	141.528.931,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	117.500.000,00	114.926.900,00	97,81	2.573.100,00
		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	165.000.000,00	146.881.970,00	89,02	18.118.030,00
		Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	964.735.200,00	964.735.200,00	100	-
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.287.017.529,80	1.287.017.529,80	100,00	-
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	9.140.063.266,10	9.132.103.458,10	99,91	7.959.808,00
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.447.645.900,00	1.447.304.000,00	99,98	341.900,00
		Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	425.992.920,00	425.992.920,00	100	-
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	75.000.000,00	74.636.400,00	99,52	363.600,00
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	3.555.805.451,00	3.443.632.958,00	96,85	112.172.493,00

**Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025**

	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
<b>2025</b>	170,140	20,67	95,987	11,66	215,055	26,13	341,906	41,54
<b>2024</b>	164,56	19,99	95,99	11,66	215,06	26,13	347,49	42,22
<b>Progres</b>	5,582	0,68	0,000	0,00	0,000	0,00	(5,582)	(0,68)

\* Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik merupakan akumulasi jumlah ruas jalan baik dan sedang dengan Rasio 32,33

Berikut beberapa kegiatan yang terlaksana untuk mendukung sasaran strategis serta indicator capaian kinerja pada Bidang Bina Marga selaku bidang pengampu:

- Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis Kapot - Batu Ampar, Kec. Siding (HJP TA. 2023);
- Pekerjaan Penggantian Jembatan Ruas Jalan Parit Mas - Jembatan 25, Kec. Monterado (HJP TA.2021) (Dana Insentif Fiskal Rp. 964.735.200,00) TA. 2025;
- Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (khusus Kabupaten) Jalan Semidang-Sejarok Param (HJP TA. 2022) (Dana Insentif Fiskal Rp. 1.306.411.465,00) TA. 2025;
- Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Rangkang-Sentagi, Desa Bani Amas, Kec.

- Bengkayang (HJP TA. 2022) (Dana Insentif Fiskal Rp. 280.637.524,00) TA. 2025;
- Pekerjaan Pembangunan Jembatan Mangkaman, Kec. Sungai Betung (Lanjutan) (HJP TA. 2022) DAU Rp. 205.157.920,00 TA. 2025;
  - Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Pakucing - Sibaju ( KDP Tahun 2024/DBH SAWIT TA. 2024) Rp. 615.871.250,00 TA. 2025;
  - Pekerjaan Pembangunan Drainase Rt. 10 Dsn. Setia Maju Desa Kamuh Kec. Tujuh Belas (KDP TAHUN 2022/DAU Rp. 33.716.809,80) TA. 2025;
  - Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Jelatang-Bentarat (Batu Ajong), Kec. Ledo (KDP TAHUN 2022/DAU Rp. 71.886.800,00) TA. 2025;
  - Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Sungai Gamot, Dusun Senapit, Kec. Ledo (KDP TAHUN 2022/DAU Rp. 132.576.000,00) TA. 2025;
  - Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Sungai Senapit, Dusun Sejaro, Kec. Ledo (KDP TAHUN 2022/DAU Rp. 88.259.000,00) TA. 2025;
  - Pekerjaan Penanganan Jalan Desa Semunying, Kec. Jagoi Babang;
  - Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Pada Jalan Kabupaten Ruas Jalan Sentabeng Desa Sekida Kec. Jagoi Babang;
  - Pekerjaan Penanganan Jalan Tugu Samalantan, Kec. Samalantan;
  - Pekerjaan Penanganan Pasca Longsor Jalan Baremada, Kec. Lumar;
  - Pekerjaan Penanganan Jalan Kantor Bupati Bengkayang, Kec. Bengkayang;
  - Pekerjaan Penanganan Jalan Kantor DISPORAPAR Bengkayang, Kec. Bengkayang;
  - Pekerjaan Penanganan Jalan Komplek Perkantoran Pemda Bengkayang, Kec. Bengkayang;
  - Pekerjaan Penanganan Jalan Komplek Pengadilan Bengkayang, Kec. Bengkayang;
  - Pekerjaan Penanganan Pasca Longsor DPT Jalan Rangkang-Magmagan, Kec. Bengkayang;
  - dst

### **3.2.6 Sasaran Strategis 6 “Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”**

Capaian indikator *Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur serta Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel* menunjukkan kemajuan signifikan sebagai hasil dari berbagai program reformasi birokrasi, penguatan kapasitas aparatur, serta penerapan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik. Peningkatan ini tercermin dari perbaikan kualitas layanan publik, percepatan penyelesaian layanan administrasi, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Di sisi lain, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk perencanaan, pelaporan, dan pengawasan penggunaan anggaran serta pemanfaatan aset secara efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, peningkatan efisiensi anggaran, serta optimalisasi aset daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun aparatur yang profesional, pelayanan publik yang berkualitas, serta sistem keuangan dan pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

### Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun berjalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	63,85	64,05	63,85	1,00
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%	95	95	95,61	1,01

1. Capaian indikator *Predikat Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)* menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Peningkatan predikat nilai SAKIP mencerminkan keberhasilan dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kinerja aparatur serta pengelolaan sumber daya daerah secara terukur, sistematis, dan berbasis kinerja.

Predikat nilai SAKIP yang baik atau meningkat menggambarkan kualitas manajemen pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Hal ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, terpercaya, dan berorientasi pada hasil.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang menunjukkan nilai sebesar 63,85 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Instansi atau Perangkat Daerah dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30	20,10	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15	9,75	9,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,00	12,50
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>63,85</b>	<b>63,85</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

2. Capaian indikator *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* menunjukkan tingkat ketersediaan dan pemanfaatan layanan pendukung yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien. Peningkatan persentase ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas, sarana, dan jasa pendukung yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga mendukung kelancaran operasional pemerintahan.

Penyediaan jasa penunjang yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas aparatur, percepatan pelayanan publik, serta

efektivitas koordinasi antar-unit kerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang profesional, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

#### **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	%		
10	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka);	7.244.779.872,10	6.926.511.542,00	95,61	1,00	1,04
			Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%).					

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran yang sangat baik dalam mendukung sasaran strategis peningkatan pelayanan publik, kinerja aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp7.244.779.872,10, dengan realisasi sebesar Rp6.926.511.542,00, mencapai 95,61% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut berhasil mendukung capaian kinerja dengan nilai 1,00 pada indikator persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah.

Selain itu, nilai survei kepuasan masyarakat yang diperoleh adalah 1,01, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,05, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya efektif dalam memenuhi target kinerja, tetapi juga sangat efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memberikan layanan yang memuaskan masyarakat.

Tingkat efisiensi anggaran yang lebih dari satu (1,04) menunjukkan bahwa program ini telah mengelola anggaran secara optimal, menghasilkan output dan outcome yang melebihi ekspektasi relatif terhadap penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat dikategorikan sangat efisien dan efektif, memberikan kontribusi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian		Tahun 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	0	63,85	64,05	63,85	99,69
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	88,2	95,79	100	97,42	97,42

Pada tahun 2023, capaian kedua indikator untuk sasaran strategis ini masih 0, menunjukkan bahwa program penguatan kinerja aparatur dan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah belum dilaksanakan secara signifikan atau baru mulai direncanakan.

Memasuki tahun 2024, pemerintah menetapkan target ambisius: Predikat Nilai Sakip dengan capaian 63,85 dan Tahun 2025 dengan target 64,05 dengan realisasi masih diangka 63,85 terjadi perubahan di beberapa penilaian SAKIP menghasilkan capaian 99,69%. menunjukkan pengelolaan program yang efektif dan efisien.

Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Target 100%, realisasi 97,42%, dengan capaian 97,42%. Meski belum mencapai target penuh, pencapaian ini menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya, karena hampir seluruh target penyediaan jasa penunjang berhasil diwujudkan.

Secara keseluruhan, efisiensi anggaran terlihat dari capaian yang mendekati atau melebihi target, terutama pada indikator kinerja aparatur (Predikat Nilai Sakip). Meskipun realisasi untuk penyediaan jasa penunjang sedikit di bawah target, selisihnya relatif kecil, menandakan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan efektif, antara realisasi dan target, perbedaan tersebut relatif kecil, sehingga secara keseluruhan program berhasil berjalan sesuai rencana dan efektif.

### **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023, 2024, 2025 dan target RPJMD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target RPJMD
			2023	2024	2025	
6	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat Nilai Sakip (Kategori)	0	63,85	63,85	64,85
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	88,2	95,79	97,42	100

Dalam rangka mewujudkan meningkatnya pelayanan publik dan kinerja aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, kinerja diukur melalui dua indikator utama, yaitu Predikat Nilai SAKIP dan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk indikator Predikat Nilai SAKIP, realisasi kinerja pada tahun 2023 belum menunjukkan capaian nilai (0). Pada tahun 2024, realisasi meningkat signifikan dengan capaian sebesar 63,85, dan nilai tersebut tetap dipertahankan pada tahun 2025 sebesar 63,85. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023, capaian tahun 2024 dan 2025 tersebut masih belum sepenuhnya mencapai target RPJMD yang ditetapkan sebesar 64,85, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sementara itu, indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023, realisasi kinerja tercatat sebesar 88,2%, kemudian meningkat menjadi 95,79% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 97,42% pada tahun 2025. Meskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja yang semakin optimal dari tahun ke tahun, realisasi hingga tahun 2025 masih belum mencapai target RPJMD yang ditetapkan sebesar 100%.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023–2025 menunjukkan adanya tren peningkatan yang positif pada kedua indikator kinerja utama. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara realisasi kinerja dengan target RPJMD, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis



dan berkelanjutan guna memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan dana untuk belanja dari Dana APBD Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 47.066.771.769,00 dengan rincian sebagaimana pada table berikut :

**Program, Kegiatan beserta Pagu Anggaran dan Realisasi  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	47.066.771.769,00	45.853.718.727,90	97,42
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.066.771.769,00	45.853.718.727,90	97,42
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.066.771.769,00	45.853.718.727,90	97,42
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.244.779.872,10	6.926.511.542,00	95,61
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.926.500,00	40.926.500,00	100,00
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.780.000,00	6.780.000,00	100,00
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.698.500,00	5.698.500,00	100,00
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.592.000,00	7.592.000,00	100,00
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.818.500,00	5.818.500,00	100,00
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.663.000,00	3.663.000,00	100,00
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.374.500,00	11.374.500,00	100,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.372.120.532,10	5.186.521.184,00	96,55
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.355.115.532,10	5.169.636.184,00	96,54
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.005.000,00	16.885.000,00	99,29
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.902.000,00	23.470.330,00	98,19
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.880.000,00	9.520.000,00	96,36
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.022.000,00	13.950.330,00	99,49
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.042.000,00	470.138.118,00	88,87
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.940.000,00	72.068.420,00	81,03
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.250.000,00	105.890.680,00	99,66
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.850.000,00	64.713.330,00	80,04
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.800.000,00	40.320.000,00	66,32
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.202.000,00	155.465.400,00	97,04
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17.000.000,00	16.695.288,00	98,21
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.200.000,00	13.186.800,00	99,90
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.200.000,00	13.186.800,00	99,90
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.661.760,00	650.868.460,00	98,37
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.800.000,00	164.260.300,00	93,97
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.861.760,00	474.608.160,00	99,95
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.927.080,00	541.400.150,00	89,65
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.425.000,00	269.086.700,00	88,68
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.400.000,00	12.223.230,00	98,57



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	212.297.780,00	202.438.720,00	95,36
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.500.000,00	57.651.500,00	98,55
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.304.300,00	-	0,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	336.880.050,00	170.956.450,00	50,75
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.401.050,00	107.401.050,00	100,00
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	107.401.050,00	107.401.050,00	100,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.479.000,00	63.555.400,00	27,70
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	229.479.000,00	63.555.400,00	27,70
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.625.667.500,00	15.418.800.500,00	98,68
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.625.667.500,00	15.418.800.500,00	98,68
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00	99.345.000,00	99,35
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.525.667.500,00	15.319.455.500,00	98,67
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.420.497.000,00	4.380.915.500,00	99,10
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.420.497.000,00	4.380.915.500,00	99,10
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	4.420.497.000,00	4.380.915.500,00	99,10
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.996.527.080,00	1.816.881.000,00	91,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.996.527.080,00	1.816.881.000,00	91,00
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.873.802.080,00	1.743.994.000,00	93,07
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	122.725.000,00	72.887.000,00	59,39
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	17.178.760.266,90	17.037.231.335,90	99,18
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	17.178.760.266,90	17.037.231.335,90	99,18
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	117.500.000,00	114.926.900,00	97,81
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	165.000.000,00	146.881.970,00	89,02
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	964.735.200,00	964.735.200,00	100,00
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	1.287.017.529,80	1.287.017.529,80	100,00
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	9.140.063.266,10	9.132.103.458,10	99,91
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	1.447.645.900,00	1.447.304.000,00	99,98
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	425.992.920,00	425.992.920,00	100,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	75.000.000,00	74.636.400,00	99,52
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.555.805.451,00	3.443.632.958,00	96,85
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	14.200.000,00	7.995.400,00	56,31
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	10.000.000,00	7.995.400,00	79,95
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	10.000.000,00	7.995.400,00	79,95
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000,00	-	0,00
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	4.200.000,00	-	0,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	249.460.000,00	94.427.000,00	37,85
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	110.000.000,00	18.528.700,00	16,84
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	110.000.000,00	18.528.700,00	16,84
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	83.000.000,00	38.441.900,00	46,32
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	83.000.000,00	38.441.900,00	46,32



<b>Kode</b>	<b>Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	56.460.000,00	37.456.400,00	66,34
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	56.460.000,00	37.456.400,00	66,34
	<b>Jumlah</b>	<b>47.066.771.769,00</b>	<b>45.853.718.727,90</b>	<b>97,42</b>



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan Good Governance Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang, kemudian untuk penyelarasan Capaian Kinerja mengalami beberapa penyesuaian pada Target Kinerja mengacu pada Renstra periode Tahun 2025-2029;
- b. Hasil Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang pada Perjanjian Kinerja awal dan Perubahan Perjanjian Kinerja mengalami beberapa penyesuaian sehingga seharusnya Capaian Kinerja yang mengacu pada Renstra periode 2025-2029 dapat mencapai target yang ditetapkan;
- c. Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang didukung dana sejumlah sebesar Rp. 47.066.771.769,00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.853.718.727,90 atau 97,42%;
- d. Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.



#### 4.2 SARAN

Dengan peningkatan pengawasan/pemeriksaan yang sasarannya adalah Peningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah daerah di mata masyarakat. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang sebagaimana Tupoksi yang diimbau, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Bengkayang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja dengan target yang terukur perlu kiranya dapat memprioritaskan anggaran yang mencukupi hal ini dapat di lihat dari beberapa tahun terakhir pencapaian kinerja masih dibawah target yang wajar.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini dapat tersusun, semoga bermanfaat sebagaimana diharapkan.

Bengkayang, Februari 2026

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang



**MARTINUS PONES.ST**

Pembina Utama Muda

NIP.19661112 200003 1 004